



Judul : RUU BUMN Belum Rampung: Fraksi Gerindra Minta Super Holding Ditunda
Tanggal : Rabu, 07 September 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

RUU BUMN Belum Rampung Fraksi Gerindra Minta Super Holding Ditunda

SUARA penolakan terhadap rencana Menteri BUMN Rini Soemarno membentuk holding dan super holding BUMN kembali terdengar. Wakil Ketua Komisi VI DPR M Hekal menyebut, rencana tersebut bertentangan dengan undang-undang.

Bagi politisi Gerindra itu, rencana holding dan super holding BUMN justru berbahaya. Sebab, jika hal itu terbentuk, Dewan tidak bisa lagi melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN-BUMN:

“Karenanya, saya mewakili Fraksi Gerindra meminta ditunda sampai dengan selesainya revisi Undang-Undang BUMN. Supaya disiapkan dulu perangkat hukum yang mawadahi. Mudah-mudahan teman-teman fraksi lain bisa setuju,” ucapnya, kemarin.

Dia juga kesal dengan sikap Rini yang melontarkan wacana tersebut tanpa berkonsultasi dengan DPR. Padahal, setiap kebijakan mengenai BUMN harusnya mendapatkan persetujuan DPR.

Sebelumnya, Rini menjelaskan bahwa di 2019 tidak akan ada lagi Kementerian BUMN. Yang ada adalah super holding yang dikelola oleh para profesional. Rini bermimpi, dengan super holding, BUMN Indonesia bisa tumbuh besar seperti Khazanah di Malaysia atau Temasek di Singapura.

Tapi, bagi Hekal, super holding belum tentu mujarab dalam meningkatkan BUMN. “Ibarat jenis obat baru yang belum terdaftar, kan belum tentu baik. Bisa jadi baik, bisa juga racun,” cetusnya.

Anggota Komisi VI DPR Siti Mukaromah menolak dengan

lebih halus. Kata dia, pembentukan holding belum tentu berdampak besar bagi perekonomian dan hajat hidup orang banyak. Karena itu, pemerintah mesti mengkajinya secara komprehensif dan hati-hati.

Politisi PKB menyoroti rencana holding yang paling dekat, yaitu Pertamina dan PGN. Kata dia, ada tiga hal yang dipertimbangkan sebelum melakukan holding itu. Pertama, PGN merupakan perusahaan terbuka dengan 43 persen sahamnya dimiliki publik, sedangkan Pertamina bukan perusahaan terbuka. Kedua, belum ada road map tata kelola migas. Ketiga, RUU BUMN sebagai revisi UU Nomor 19/2003 masih dalam pembahasan di Komisi VI DPR.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi juga keberatan dengan rencana super holding itu. Politisi Nasdem ini menilai penyatuan perusahaan negara tidak cukup strategis bahkan dapat dinilai tidak tepat. Sebab, dengan super holding itu akan mempersatukan semua bisnis BUMN.

“Saya kira kurang tepat *super holding* ini. Katakanlah lintas disiplinnya kurang tepat. Migas hanya migas. Karya dengan karya. Jangan dipaksakan dicampur karena sifat bisnisnya berbeda,” ujar Kurtubi.

Menurut Kurtubi, akan lebih masuk akal jika peleburan perusahaan disesuaikan dengan sektornya. Dia tidak keberatan jika Pertamina dan PGN dilakukan holding, sebab masih satu bidang. “Kalau untuk sektor Migas sebaiknya dalam bentuk holding satu company. Pertamina dan PGN,” ujarnya. ■ QAR